



# Permasalahan APBD 2018 Tuntas

## Lahirkan Lima Poin Kesepakatan

**NANGA PINOH**-Sejumlah masyarakat berharap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 bisa dilaksanakan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi. Apalagi sudah difasilitasi langsung PJ Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji diharapkan Bupati dan DPRD menemukan kesepakatan bersama terkait rencana kerja anggaran dilingkungan pemerintahan daerah.

"Kami minta APBD tahun 2018 bisa dijalankan. Supaya pelayanan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Kepala Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu Kelleb, Rabu (21/3) kepada media ini.

Dia mengatakan dengan adanya kesepakatan bersama dari unsur pimpinan terkait. Tentunya rencana kerja anggaran bisa dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menuturkan begitu juga anggaran dana desa, tidak seharusnya dilakukan pemotongan. Sehingga akan berdampak kepada pelayanan masyarakat desa dilingkungan pemerintah Kabupaten Melawi. "Kami minta agar dana desa tidak dilakukan pemotongan. Apalagi ini demi pembangunan masyarakat dipemerintahan desa," harap Kades Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu.

Sementara PJ Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji menanggapi terkait anggaran



AIRIN FITRIANSYAH//PONTIANAK POST

**KESEPAKATAN:** Ketua DPRD Abang Tajudin dan Bupati Panji membuat berita acara kesepakatan bersama APBD 2018.

dana desa selayaknya menjadi perhatian pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya program Nawacita Presiden RI Joko Widodo yakni membangun masyarakat dari pinggiran. Tentunya alokasi dana desa menjadi perhatian khusus pemerintah untuk memberikan kualitas pembangunan masyarakat lebih baik ditingkat desa.

"Program pemerintah pusat sangat peduli dengan masyarakat ditingkat desa. Anggaran dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat desa. Itu semua demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tukasnya.

Selanjutnya Bupati Melawi Panji, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Melawi membuat kesepakatan bersama dalam rapat yang difasilitasi PJ Gubernur Kalimantan Barat.

Adapun kesepakatan bersama itu menghasilkan lima poin penting dalam pem-

bahasan APBD tahun 2018 dalam pemerintahan Kabupaten Melawi. Yakni alokasi dana desa tetap dianggarkan dalam APBD murni tahun 2018 sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian penganggaran untuk pembayaran hutang jangka pendek tahun 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2018 setelah mendapat hasil audit dari BPK.

Selanjutnya penganggaran untuk pembayaran hutang jangka pendek tahun 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan pada perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2018.

Mengingat pertimbangan waktu, maka anggaran pembangunan Kantor Bupati Melawi tahun 2018 di kurangi Rp 2,8 miliar. Sedangkan data rasionalisasi belanja untuk pembayaran hutang jangka pendek terlampir. (*irn*)